

Pengantar

Prof.Dr.Saiful Deni. M.Si



Penulis :

Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si

Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si

Dr. Iksan R.A. Arsad, M.Si

Rasid Pora

Ali Lating. M.A.

Raoda M Djae

Abdullah Kaunar

M. Rusdy Namsa

Syarifuddin Usman

Rahmat Suaib

Sahrul Pora

Bakri La Suhu

Partai Politik

PEMILU

Dan
Oligarki Di

Indonesia

Editor:

Ali Lating

Raoda M.Djae



Etalase demokrasi Indonesia memperlihatkan dinamika fleksibilitas pasca reformasi. Reproduksi kekuasaan melalui pemilu baik Pemilihan Presiden, Kepala Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota maupun pemilihan legislative pusat dan daerah. Harapan akan lahirnya kepemimpinan Politik yang baik atau berintegritas merupakan salah satu tujuan akhir dari proses pemilihan berlangsung. Kepemimpinan Politik yang berintegritas sangat dipengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara baik dari aspek integritas maupun kredibilitas, serta derajat keterbukaan, kebebasan berkonpetisi secara adil maupun transparansi dalam penghitungan suara yang menjadi fondasi bagi regim penyelenggara dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat.

Kekhawatiran publik terhadap proses rotasi kekuasaan secara periodik melalui pemilu tersebut memiliki alasan yang kuat ditengah praktek oligarki yang hingga kini diduga masih membajak sebahagian infrastruktur politik (partai politik) maupun proses pemilihan oleh berbagai aktor strategis yang memiliki sumber daya (finansial) untuk mempertahankan keberlangsungan sumber daya yang dimiliki maupun ekspolorasi sumber baru untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok melalui dominasi dan jejaring relasi kuasa. Berbagai faktor yang menjadi pelumas keberlangsungan oligarki yang kian mendapatkan ruang akrobatiknya baik pada aspek pemilih seperti faktor ekonomi, pendidikan dan budaya. Pada aspek kelembagaan partai oligarki menguat karena, dominasi elit dalam pengambilan keputusan strategis di internal partai, ambang batas pencalonan kandidat dan kerangka hukum yang lemah merespon praktek oligarki dalam penyelenggaraan pemilu.

Dibutuhkan politik gagasan, pendidikan politik yang baik untuk meminimalisasi politik uang, golput maupun praktek oligarki. Partai politik sebagai sarana reproduksi elit strategis memiliki kewajiban untuk mewujudkan pemimpin politik yang genial salah satunya melalui *talent scouting political elite*.

PARTAI POLITIK PEMILU DAN OLIGARKI DI INDONESIA

Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si
Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si
Dr. Iksan R.A. Arsad, M.Si
Rasid Pora
Ali Lating, M.A.
Raoda M Djae
Abdullah Kaunar
M. Rusdy Namsa
Syarifuddin Usman
Rahmat Suaib
Sahrul Pora
Bakri La Suhu



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**PARTAI POLITIK PEMILU DAN OLIGARKI
DI INDONESIA**

Penulis : Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si, Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si, Dr. Iksan R.A. Arsad, M.Si, Rasid Pora, Ali Lating. M.A., Raoda M Djae, Abdullah Kaunar, M. Rusdy Namsa, Syarifuddin Usman, Rahmat Suaib, Sahrul Pora, Bakri La Suhu

Editor : Ali Lating
Raoda M.Djae

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-797-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Saiful Deni, S.Pd., M.Si

Bismillahirrahmanirrahim

Perkembangan publikasi hasil karya dosen di UMMU patut diapresiasi dengan baik. Buku ini telah mengisi perbendaharaan khazanah keilmuan di Indonesia. Sebagai kampus yang menekankan pada motto UMMU: islami, inovatif dan berkemajuan, dijawab oleh para dosen dengan bukti karya terbaru tentang Partai Politik, Pemilu dan Oligarki di Indonesia. Kolaborasi berbagai dosen dengan spesialisasi keilmuan yang berbeda-beda telah menguatkan relasi wacana dan sikap nalar.

Pada BAB I. Pemilu Berintegritas Kepemimpinan Politik Dan Kontestasi Aristokrasi, terdiri dari beberapa penulis dengan topik sentralnya adalah Mengkonstruksi Demokrasi Berkeadaban Melalui Pemilu Berintegritas Di Indonesia (DR. Aji Deni, S.Pd., M.Si); Kontribusi Kepemimpinan Politik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (DR. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si); Kontestasi Politik Aristokrasi dan Non Aristokrasi Di Maluku Utara (DR.Iksan R.A Arsad. M.Si).

Pada BAB II. Pemilu Dalam Pusaran Oligarki Di Indonesia Pemilu, diuraikan dengan beberapa hasil pemikiran brilliant yaitu: Politik Uang Dan Cacat Demokrasi (Rasid Pora); Pemilu Dan Pilkada Ruang Reproduksi Oligarki (Ali Lating); Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia (Raoda M Djae). Pada BAB III. Multi Partai Talent Scouting Dan Politik Gagasan, diisi dengan judul Sistem Multi Partai Relasi Kelembagaan Dalam Sistem Presidensial (Abdullah Kaunar); "Talent Scouting" Partai Politik Pemilu Dan Oligarki (M. Rusdy Namsa); Politik Gagasan: Catatan untuk Bakal Calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Legislatif (Syarifuddin Usman); Menyoal Fungsi Partai Politik: Catatan Untuk Pemilu 2024 (Rahmat Suaib); Pada BAB IV. Diangkat topik tentang Pemilu Calon Tunggal Kotak Kosong dan Golput Anomali Demokrasi Lokal: Fenomena Calon Tunggal VS Kotak Kosong Dalam Pilkada (Sahrul Pora); Fenomena Golput Dalam Pemilihan

Umum Secara Langsung: Catatan Demokrasi Untuk Pemilu Tahun 2024 (Bakri La Suhu).

UMMU berkeyakinan sebagai institusi Pendidikan tetap berada pada posisi menjunjung tinggi komitmen bahwa Pemilu yang terpercaya membutuhkan kredibilitas dan integritas, nilai-nilai, akuntabilitas, publik, moral, standar, dan wajib memerangi politik uang. UMMU telah berada pada komitmen mendorong tata kelola demokrasi yang berkeadaban. Kita semua mendambakan pemilihan yang bebas dan adil yang membutuhkan kebebasan demokrasi, kebebasan menyatakan pilihannya namun tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat pemungutan suara. Dalam ranah politik, transparansi alat penting untuk menjaga akuntabilitas di antara otoritas publik. Masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya melalui berbagai media digital yang dikenal dengan E-Demokrasi mampu memanfaatkan media sosial tentang hak politik yang dapat dicapai melalui sistem demokrasi.

Fenomena politik lokal dewasa ini dapat dirunut ke akarnya bahwa munculnya dua bentuk budaya politik yaitu hubungan aristokrasi politik, termasuk di Maluku Utara telah membentuk pemerintahan bersama yang Empat (Moloku Kie Raha) dengan membangun kekuatan perdagangan rempah. Bagaimana idealnya hak-hak adat dibangun di atas kerangka pemerintahan yang demokrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan Good Governance yang berkembang dari hubungan sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat adalah partisipasi, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness, and efficiency. Namun ikhtiar kita terhadap dominasi elite adalah penting karena akan merusak demokrasi terutama dalam pengambilan keputusan, proses rekrutmen elit strategis, dan rendahnya akuntabilitas rekrutmen anggota di internal partai. Semoga buku ini menjadi referensi dalam pengelolaan demokrasi.

Ternate,..... Februari 2022

Rektor UMMU

Prof. Dr. Saiful Deni, S.Ag., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB 1 PEMILU BERINTEGRITAS KEPEMIMPINAN POLITIK DAN KONTESTASI ARISTOKRASI	1
Mengkonstruksi Demokrasi Berkeadaban Melalui Pemilu Berintegritas di Indonesia	1
Kontribusi Kepemimpinan Politik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik	26
Kontestasi Politik Aristokrasi dan Non Aristokrasi di Maluku Utara	43
BAB 2 PEMILU DALAM PUSARAN OLIGARKI DI INDONESIA	60
Pemilu Politik Uang dan Cacat Demokrasi	60
Pemilu dan Pilkada Ruang Reproduksi Oligarki	78
Partai Politik Pemilu dan Oligarki di Indonesia	91
BAB 3 MULTI PARTAI TALENT SCOUTING DAN POLITIK GAGASAN	109
Sistem Multi Partai Relasi Kelembagaan dalam Sistem Presidensial	109
<i>Talent Scouting</i> Partai Politik dan Pemilu	123
Pemilu dan Politik Gagasan; Catatan untuk Bakal CAKADA dan BACALEG	140
Menyoal Fungsi Partai Politik (Catatan untuk Pemilu 2024)	153
BAB 4 PEMILU CALON TUNGGAL KOTAK KOSONG DAN GOLPUT	166
Anomali Demokrasi Lokal (Fenomena Calon Tunggal VS Kotak Kosong dalam Pilkada)	166
Fenomena Golput dalam Pemilihan Umum Secara Langsung (Catatan Demokrasi Untuk Pemilu Tahun 2024)	185
TENTANG PENULIS	197

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Perolehan Kursi Partai Politik dan ABRI di DPRD Kabupaten Maluku Utara pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997.....	50
Tabel 2. Keterwakilan Clan Aristokratik pada Legislatif Lokal Maluku Utara Hasil Pemilu 2014.....	53
Tabel 3. Daftar Calon Tunggal pada Pilkada 2018.....	172
Tabel 4. Daftar Calon Tunggal Pilkada 2020.....	173
Tabel 5. Presentase Golput Pemilihan Umum di Indonesia.....	194

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan dalam Pencarian Informasi Tentang “ <i>Electoral Integrity</i> ” melalui Aplikasi Google dalam 5 Tahun Terakhir.....	5
Gambar 2. Data Praktik Politik Uang di Tahun 2017-2019.....	69
Gambar 3. Grafik Peningkatan Calon tunggal di Pilkada.....	174

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif di Indonesia Sejak Tahun 1955.....	9
Grafik 2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia.....	10

BAB 1

PEMILU BERINTEGRITAS KEPEMIMPINAN POLITIK DAN KONTESTASI ARISTOKRASI

**Mengkonstruksi Demokrasi Berkeadaban
Melalui Pemilu Berintegritas di Indonesia**

DR. Aji Deni, S.Pd., M.Si

1. Pengantar

Dalam 5 tahun terakhir (2018-2023) perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan kualitas berdemokrasi. Berbagai dinamika demokrasi lebih terkooptasi pada kepentingan elite politisi, pemodal oligarkis dan bangkitnya nasionalisme populisme. Gambaran ini dapat terkonfirmasi melalui beberapa kajian Pustaka sebelumnya seperti populisme dan politisasi agama dalam demokrasi (Susanto (2019); rute suksesi petahana di parlemen yang tidak lumrah (Buehler, 2019); tergerusnya demokrasi Pancasila oleh menguatnya tekanan globalisasi (Gumbira, 2019); perpecahan kelompok kepentingan dalam demokrasi (Fionna, 2019); rumitnya penguatan demokrasi elektoral melalui undang-undang pemilu Fahmi (2019); semakin meluasnya politik aliran dalam kontestasi pemilu (Herdiansah, 2019); demokrasi dan perlindungan sosial (Pick, 2019); patronase dan klientelisme dalam demokrasi ekonomi politik (Berenschot, 2018); paradoks administrasi desentralisasi dan demokrasi (Heo, 2018); maraknya berita bohong dan pemutusan akses internet (Rahman, 2022) sebagai gejala gagalnya penegakan demokrasi di Indoensia saat ini.

Demokrasi juga mengalami regresi/kemunduran di era pemerintahan Jokowi (Siregar, 2022). Selain itu keterlibatan

Lembaga MUI dalam fatwa dianggap oleh (Hasyim, 2020) semakin konservatif dalam memposisikan kelembagaan dalam menyikapi isu-isu dinamika demokrasi yang lebih majemuk. Hal ini dapat dilihat pada praktek demokrasi yang masih bersifat semu (Bate'e, 2022); masih menerapkan politik eksklusif (Amal, 2020); persaingan sumberdaya dan dinamika kekuasaan yang timpang (Diprose & Azca, 2020) dengan politik identitas Indonesia yang meruntuhkan supremasi demokrasi procedural (Sawitri, 2021). Gambaran serupa dijelaskan (Ahmad, 2022) bahwa pemilu legislatif Indonesia hasilnya ditentukan oleh orinetasi pasar partai politik

Demikian pula beberapa fenomena menarik lainnya adalah keanehan hasil pemilu yang irasional. Hal ini dengan dipertontonkannya kemenangan demokrasi kotak kosong untuk mendukung petahana yang bermasalah hukum di Pilkada kota Makassar (Purwaningsih, 2021). Selain itu gejala gagalnya demokrasi dalam mengurangi praktek korupsi mengindikasikan bahwa demokrasi justru mengalami stagnasi dan kemunduran (Azwar & Subekan, 2022). Bahkan Beberapa pakar menyatakan bahwa demokrasi sebenarnya bukanlah obat penawar dalam memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia (Pertiwi, 2021). Dalam relasi demokrasi dan penguasa, demokrasi masih dikesampingkan oleh rezim yang berkuasa (Mujani, 2021).

Demikian halnya dengan kesamaan demokrasi di Indonesia ditandai oleh pola Gerakannya sama dengan pembangunan ekonomi yang lebih bersifat sentrifugal (Rock, 2018). Sebagai sebuah system yang perlu disuarakan, peranan media massa terhadap demokrasi perlu dipertanyakan apakah sebagai corong penguasa atau berada pada posisi yang ideal (Ahmad, 2022). Balahmar, 2021) juga menawarkan kebebasan pers sebagai prasyarat pertumbuhan demokrasi.

Indonesia merupakan negara dengan kapasitas penduduk muslim terbesar di dunia, namun perdebatan konsep tentang demokrasi berada pada posisi sama dengan semangat otoritarianisme. Barton (2021) misalnya menilai

Salah satu adalah model "e-demokrasi" dengan kemampuannya memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang upaya pendaftaran pemilih serta jenis keterlibatan masyarakat lainnya.

9. Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2020). Celebrification of Politics: Understanding Migration of Celebrities into Politics Celebrification of Celebrity Politicians in the Emerging Democracy of Indonesia. *East Asia*, 37(1), 63-79, ISSN 1096-6838, <https://doi.org/10.1007/s12140-020-09332-z>
- Ahmad, N. (2021). What Drive Marketization and Professionalization of Campaigning of Political Parties in the Emerging Democracy? Evidence from Indonesia in the Post-Soeharto New Order. *Journal of Political Marketing*, ISSN 1537-7857, <https://doi.org/10.1080/15377857.2021.1910610>
- Ahmad, N. (2022). Political markets, the party-related factors and political party's market-orientation in Indonesia's democracy: evidence from Indonesia's 2014 parliamentary election. *Quality and Quantity*, 56(1), 333-357, ISSN 0033-5177, <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01111-z>
- Ahmad, N. (2022). What drives journalists' perceptions of media powers as political image-makers in the emerging democracy of Indonesia?. *Global Media and Communication*, ISSN 1742-7665, <https://doi.org/10.1177/1742766522132183>
- Aji, M.P. (2022). Kriteria Pemilu Berintegritas: Belajar dari Australia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 10401-10409. DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9099>
- Amal, M. Khusna (2020). Revisiting southeast asian civil islam: Moderate muslims and Indonesia's democracy paradox. *Intellectual Discourse*, 28(1), 295-318, ISSN 0128-4878
- Amal, M.K. (2020). Anti-Shia mass mobilization in Indonesia's democracy: Godly alliance, militant groups and the politics of exclusion. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 25-48, ISSN 2089-1490, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.25-48>

- Amal, M.K. (2020). Towards a deliberative conflict resolution? a reflection on state inclusive response to sunni-shi'a tension in Indonesia's democracy. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(2), 226-256, ISSN 2355-1895, <https://doi.org/10.21043/qjijis.v8i2.7146>
- Amsari, F. (2021). Designing an Intra Party Democracy in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-10, ISSN 1544-0036
- Ananda, A. (2021). Does Knowing Democracy Affect Answers to Democratic Support Questions? A Survey Experiment in Indonesia. *International Journal of Public Opinion Research*, 33(2), 433-443, ISSN 0954-2892, <https://doi.org/10.1093/ijpor/edaa012>
- Azhar, M. (2020). A new perspective on relations between Islam and Democracy in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(5), 645-664, ISSN 2201-1315
- Azwar (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 195-208, ISSN 1410-4946, <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Balahmar, A.R.U. (2021). Press freedom: Using the role of government and reporters in the development of democracy in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20, 1-10, ISSN 1544-1458
- Barton, G. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), ISSN 2077-1444, <https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- Bate'E, Y. (2022). Salt and Light Analogy: A Liquid Political Model for the Pseudo-Democracy Context in Indonesia. *Journal of Church and State*, 64(1), 24-41, ISSN 0021-969X, <https://doi.org/10.1093/jcs/csab002>
- Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563-1593, ISSN 0010-4140, <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>
- Boontinand, V (2021). Educating for citizenship in a fragile democracy: interrogating civic agenda in Thai higher education. ... *Journal of Comparative and International*

Education, Taylor & Francis, <https://doi.org/10.1080/03057925.2021.1932420>

- Buehler, M. (2019). A research agenda for studying legislative incumbent turnover in new democracies, using Indonesia as a case study. *South East Asia Research*, 27(3), 203-224, ISSN 0967-828X, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1642027>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- De Meur, G., & Hubaut, X. (1986). Fair models of political fairness. *European Journal of Political Research*, 14(1-2), 237-252. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1986.tb00832.x>
- Diprose, R. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict, Security and Development*, 20(1), 191-221, ISSN 1467-8802, <https://doi.org/10.1080/14678802.2019.1705074>
- Djunaedi (2020). The enforcement of constitutional democracy: Creativity in growing responsive law in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*(3), 441-451, ISSN 2201-1315
- Djuyandi, Y. (2021). Democracy and local political participation in Sumedang, Indonesia. *Journal of Public Affairs*, ISSN 1472-3891, <https://doi.org/10.1002/pa.2726>
- Dunn, J (1996). How democracies succeed. *Economy and Society*, Taylor & Francis, <https://doi.org/10.1080/03085149600000026>
- Fahmi, K. (2019). The role of the law in safeguarding electoral democracy in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), 1-6, ISSN 1544-0036
- Fionna, U. (2019). INDONESIA'S 2019 ELECTIONS: A FRACTURED DEMOCRACY?. *Asian Affairs*, 50(4), 502-519, ISSN 0306-8374, <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Furuta, Y (2019). Education for Democracy and Citizenship in the United States: In a Time of Inequality and Social Division. *Proceedings of the Annual Conference of Japanese ...*,

jstage.jst.go.jp,
[https://www.jstage.jst.go.jp/article/taikaip/78/0/78_289/
_article/-char/ja/](https://www.jstage.jst.go.jp/article/taikaip/78/0/78_289/_article/-char/ja/)

- Grzywacz, A. (2020). Indonesia's (inter)national role as a Muslim democracy model: effectiveness and conflict between the conception and prescription roles. *Pacific Review*, 33(5), 728-756, ISSN 0951-2748, <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1585387>
- Gumbira, S.W. (2019). The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 361-378, ISSN 2460-1543, <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a8>
- Hasyim, S. (2020). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 8(1), 21-35, ISSN 2051-364X, <https://doi.org/10.1017/trn.2019.13>
- Heo, I. (2018). The paradox of administrative decentralization reform in young Asian democracies: South Korea and Indonesia. *World Affairs*, 181(4), 372-402, ISSN 0043-8200, <https://doi.org/10.1177/0043820018813474>
- Herdiansah, A.G. (2019). Extending aliran politics in electoral contest: An insight of Indonesia's democracy in the post-2014. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 518-545, ISSN 1802-548X
- Iannone, A. (2022). Democracy Crisis in South-East Asia: Media Control, Censorship, and Disinformation during the 2019 Presidential and General Elections in Indonesia, Thailand and 2019 Local Election in the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 81-97, ISSN 1410-4946, <https://doi.org/10.22146/jsp.71417>
- Jr, RV Bullough (2019). Partnering, Democratic Citizenship, and Goodlad's Agenda for Education in a Democracy. *School-University Partnerships*, [search.proquest.com, https://search.proquest.com/openview/22356fbcc0b10e5587b05df2623a2499/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4527887](https://search.proquest.com/openview/22356fbcc0b10e5587b05df2623a2499/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4527887)
- Kadir, A. (2021). VILLAGE AUTONOMY and PARTICIPATORY DEMOCRACY in INDONESIA: The PROBLEM of COMMUNITY PARTICIPATION in POST-VILLAGE AUTONOMY in the SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE.

- Public Policy and Administration*, 20(4), 514-529, ISSN 1648-2603, <https://doi.org/10.13165/VPA-21-20-4-12>
- Kawanaka, T (2008). *Political Conditions For Fair Elections.*, researchgate.net, https://www.researchgate.net/publication/23691396_Political_Conditions_for_Fair_Elections
- Mauk, M. (2022). Electoral Integrity Matters: How Electoral Process Conditions The Relationship Between Political Losing and Political Trust. *Quality and Quantity*, 56(3), 1709-1728. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01050-1>
- Moyo, N, & Magudu, S (2021). Citizenship education, democracy and communicative practices in Zimbabwe: Towards a Freirean-Habermasian framework for civic learning in teacher education. *Education, Communication and Democracy ...*, taylorfrancis.com, <https://doi.org/10.4324/9781003125440-17>
- Mujani, S. (2021). Indonesia: Jokowi sidelines democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72-86, ISSN 1045-5736, <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>
- Nanggala, A (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA (International Journal of Education and ...)*, journal.ummat.ac.id, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/IJECA/article/view/2067>
- Nguitragool, P. (2020). Indonesia's sense of self, the West, and democracy: an ontological (in)security perspective. *Contemporary Politics*, 553-572, ISSN 1356-9775, <https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1795372>
- Pertiwi, K. (2021). "Democracy is the Cure?": Evolving Constructions of Corruption in Indonesia 1994-2014. *Journal of Business Ethics*, 173(3), 507-523, ISSN 0167-4544, <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04560-y>
- Pick, A. (2019). In Indonesia, social protection can underpin democracy. *OECD Observer*, 2019(317), 32-33, ISSN 0029-7054
- Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform*, 8(2), 36-44. <https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660>

- Purwaningsih, T. (2021). Democracy without contestation: The victory of the empty box in the local election of Makassar city, South Sulawesi Indonesia in 2018. *Sociologia y Tecnociencia*, 11(2), 48-71, ISSN 1989-8487, <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.48-71>
- Rahman, R.A. (2022). Fake News and Internet Shutdowns in Indonesia: Symptoms of Failure to Uphold Democracy. *Constitutional Review*, 8(1), 151-183, ISSN 2460-0016, <https://doi.org/10.31078/consrev816>
- Rock, M.T. (2018). Indonesia's centripetal democracy and economic growth. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(1), 156-172, ISSN 1354-7860, <https://doi.org/10.1080/13547860.2017.1387371>
- Ross, EW (2021). Society, Democracy, and Economics: Challenges for Social Studies and Citizenship Education in a Neoliberal World. *Wirtschaft, Gesellschaft und Politik*, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-658-32910-5_3
- Saud, M. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443-454, ISSN 1933-1681, <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Savirani, A. (2022). Local social movements and local democracy: tin and gold mining in Indonesia. *South East Asia Research*, ISSN 0967-828X, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2022.2148553>
- Sawitri, M.Y. (2021). On the brink of post-democracy: Indonesia's identity politics in the post-truth era. *Politicka Misao*, 58(2), 141-159, ISSN 1846-8721, <https://doi.org/10.20901/PM.58.2.06>
- Sebastian, L.C. (2021). Indonesia – A Young Democracy and Its Ongoing Renovation. *The Politics of the Asia-Pacific: Triumphs, Challenges, and Threats*, 144-158
- Setyanto, B. (2020). Local democracy: Election of regional head and regional deputy head in the noken system in Papua Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* (6), 353-366, ISSN 2201-1315
- Shaw, M (2022). Worldview literacy as intercultural citizenship education: A framework for critical, reflexive engagement in plural democracy. *Education, Citizenship and Social Justice*,

journals.sagepub.com,
<https://doi.org/10.1177/17461979211062125>

- Simpson, J., & Carmona, J. (2020). *Why Democracy Failed*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108766999>
- Siregar, S.N. (2022). Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration (2014–2020). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 197-212, ISSN 1410-4946, <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Sudewo, R. A. (2017). Pemilu berintegritas. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 335–350.
- Sumaktoyo, N.G. (2020). A Price for Democracy? Religious Legislation and Religious Discrimination in Post-Soeharto Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(1), 23-42, ISSN 0007-4918, <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1661354>
- Suparno (2020). The role of political education in building a democracy system in semarang jawa central indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1743-1748, ISSN 2005-4238
- Susanto, N.H. (2019). Politicization of religion and the future of democracy in Indonesia in populism theory. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 18(54), 139-158, ISSN 1583-0039
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Suswanto, S (2021). DEMONSTRATION METHOD AS A STRATEGY FOR IMPROVING DEMOCRACY CULTURE IN CITIZENSHIP EDUCATION LEARNING FOR CLASS VIII STUDENTS *Indonesian Journal of Basic Education*, <https://doi.org/10.24127/stkiprokania.ac.id>, <https://stkiprokania.ac.id/e-jurnal/index.php/IJOBE/article/view/444>

- Tanjung, M., Saraswati, R., & A.L.W, L. (2021). Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Untuk Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas. *Arena Hukum*, 14(1), 167-192. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.9>
- Testriono (2020). Testing for incumbency advantages in a developing democracy: Elections for local government leaders in indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 200-223, ISSN 0129-797X, <https://doi.org/10.1355/cs42-2c>
- Ubaedillah, A. (2018). Civic Education for Muslim Students in the Era of Democracy: Lessons Learned from Indonesia. *Review of Faith and International Affairs*, 16(2), 50-61, ISSN 1557-0274, <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1469837>
- Ulum, M.B. (2018). Revisiting Liberal Democracy and Asian Values in Contemporary Indonesia^{*}. *Constitutional Review*, 4(1), 111-130, ISSN 2460-0016, <https://doi.org/10.31078/consrev415>
- Weiss, M.L. (2020). Indonesia in 2019: Democracy and its critics. *Asian Survey*, 60(1), 109-116, ISSN 0004-4687, <https://doi.org/10.1525/AS.2020.60.1.109>

kepemimpinan politik fungsional adalah antara lain: pada manajemen sistem politik termasuk transparansi, konsistensi, akuntabilitas dan kepastian hukum; pada variabel orientasi sistem termasuk prinsip kemandirian, kredibilitas, kemitraan, dan keunggulan, Good Governance dan kepemimpinan politik saling berhubungan secara timbal balik dan saling menunjang perkembangannya.

5. Daftar Pustaka

- Ancok, Djameluddin., "Membangun Masyarakat Indonesia yang Unggul dalam Kehidupan Global dalam Millenium Ketiga" makalah yang tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2001.
- Alpian, 1977, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik*, RinekeCipta, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus(Editor) et all, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Frank, Andre Gunder., *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*, Jakarta, Pustaka Pulsar, 1984.
- Ibrahim, Halil Abd Hi, and Supriatna Tjahja. "Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik." *Yogyakarta: Penerbit Gramasurya* (2019).
- Ibrahim, Abdul H. H., et al. *Potret Buram Pemerintahan Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik*. Edited by Usman, Syarifuddin, and Rasid Pora, Eureka Media Aksara, 2022.
- Ibrahim, Abdul Halil Hi, and Syaiful Madjid. "The Role Of Political Parties On Election Commission Performance In 2015 Mayor Election Of Ternate City."
- Mulyadi, Deddy, 2010, *Membidik Jalan Menuju Public Trust (Isu - Isu Aktual Administrasi Publik, dan Kebijakan Pelayanan Publik*, STIA LAN Bandung Press, Bandung.
- Osborne, David dan Gaebler, Tead, 1992, *Reinventing Government : How The Entrepreneorial Spirit Transforming The Public Sector*, Addison Wesley, Published, Company Ltd, Californisa, New York
- Osborne David dan Peter Plastrik, 1996, *Bunisching Bureucracy: The FiveStrategies For Reinventing Government*, Addison

- Wesley, Publishing, Company Ltd, California, New York.
- Rasid Pora, A. H. H. Ibrahim, Bakri Lasuhu, Rahmat Suaib,(2018), Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 7(4), 268-274.
- Rondinelli A. Dannis, et al., 1983, Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience, New York: World Bank.
- Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima pemerintahan yang Baik), Refika Aditama, Bandung.
- Tri Yuniyanto, Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat, Demokrasi Pemerintahan di Yogyakarta, CakraBooks, 2010.

6. Daftar Pustaka

- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).
- Ahmad, Saiful, *Politik dan Etnik: Studi Kasus Konflik Politik dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*, (Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI, 2012, disertasi).
- Amal, M. Adnan, *Maluku Utara : Perjalanan Sejarah 1250-1800, Jilid I*, (Ternate: Universitas Khairun, 2002).
- , dan Irza Arnyta Djafaar, *Maluku Utara: Perjalanan Sejarah 1800-1950*, (Ternate: Universitas Khairun, 2003).
- Arsad, Iksan R.A., *Budaya Pemerintahan: Dari Maluku Utara untuk Kybernologi*, (Ternate: UMMU Press, 2011).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Utara, *Maluku Utara dalam Angkat 1999*, (Ternate, BPS Kabupaten Maluku Utara, 1999).
- Clercq, F.S.A. de, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*, (Leiden: E.J. Brill, 1890).
- Djafaar, Irza Arnita., *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal : Iskandar Muhammad Djabir Sjah, Biografi Politik Sultan Ternate*, (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2005).
- Daliman, A., *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Adminstrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
- Hanna, Willard, dan Des Alwi, *Ternate dan Tidore : Masa Lalu yang Penuh Gejolak*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998).
- Ishiyama, John T., dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis*, (pen. Ahmad Fedyani Syaifuddin), (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kahin, George McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013).
- Leirissa, R.Z., *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- , *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sejarah, 2006).

- Marbun, B.N., *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita : Perkembangan Otda, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010).
- Muhammad, Syahril, *Ternate: Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004).
- , Irwan Abbas, Rustam Hasyim, Umi Barjiyah, Ade Ismail, Mustafa Mansur, Taufik Abdullah, dan Ridwan, *Sejarah Pembentukan Provinsi Maluku Utara*, (Ternate: Kerjasama Badan Kearsipan-Perpustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Maluku Utara, dan Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun, 2015).
- Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, (pen. Kelompok MITOS), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991).
- Strong, C.F., *Modern Political Constitutions: an Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (London: Sidgwick and Jackson Limited, Fifth Edition, 1958).
- Surjo, Djoko, Nasikun, Cornelis Lay, Fajrul Falakh, Budhy K. Zaman, Aris Arif Mundayat, dan Marthia Adelheida, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2001).
- van Klinken, Gerry, *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007).

BAB 2

PEMILU DALAM PUSARAN OLIGARKI DI INDONESIA

Pemilu Politik Uang dan Cacat Demokrasi

Rasid Pora

1. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 berhasil menciptakan proses demokratisasi politik dimana pemilik kekuasaan tidak lagi dimonopoli semata oleh negara. Negara represif dan totaliter seperti jaman Orde Baru yang begitu dominan dalam semua pengelolaan kekuasaan maupun sumber daya politik telah tumbang dan berganti dengan era demokratik dimana ada peningkatan kontrol dan partisipasi publik dalam berbagai hal. Perwujudan model demokratik tersebut dalam perjalanannya dapat kita lihat dengan diadakannya proses pemilihan pejabat pemerintahan (Presiden, Kepala Daerah, Anggota Legislatif) secara langsung. Konsep dasar dari demokrasi sendiri menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan penuh atas kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Demokrasi dalam pengertian yang klasik adalah suatu pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan rakyat. Maksud dari pengertian tersebut adalah pemerintah sebagai representasi dari negara, dalam menjalankan kekuasaannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi (Pora, Qodir dan

Purwaningsih 2021:18). Dalam kajian akademik, Demokrasi menurut Schumpeter adalah sebuah metode yang memiliki prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu (Susanti, 2018:116). Atas dasar itu maka salah satu prinsip yang sangat penting dalam sistem demokrasi adalah penyerahan kedaulatan penuh kepada rakyat termasuk dalam hal penentuan pejabat politik. Pemilihan pejabat politik yang dilakukan secara tidak langsung sama artinya dengan mengingkari kedaulatan rakyat sebab rakyat tidak diberikan kesempatan untuk memilih para pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif harus didesain dengan memberikan akses kepada rakyat dalam menentukan sendiri atau memilih secara langsung siapa pemimpin yang dikehendaknya.

Pemilihan umum secara langsung mempunyai nilai signifikan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan dinamis. Demokrasi yang sehat harus dipahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas, mandiri dan bermartabat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zen (2015:525) bahwa Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas. Demokrasi menganut prinsip kebebasan, prinsip kesamaan dan prinsip kehendak rakyat mayoritas. Kekuasaan diamanatkan kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan yang bebas berdasarkan suara mayoritas rakyat.

Pemilu sebagai representasi demokrasi merupakan peristiwa penting yang menghubungkan kandidat dengan pemilih. Persaingan dalam memenangkan hati masyarakat dalam pemilihan dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang demokratis dilakukan dengan menjual visi, misi, program dan kegiatan calon pejabat politik kepada pemilih. Cara lain adalah menggunakan rekam jejak para kandidat calon sebagai pilihan bijak bagi masyarakat dalam memberikan pilihan politik pada

semuanya dikembalikan kepada masyarakat dan kejujuran para calon yang akan berlaga, disamping penegakan hukum kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pandang bulu, harus menjadi prioritas utama.

5. Daftar Pustaka

- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(3).
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151-162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>
- Awaludin, A., & Kusuma, U. W. (2021). *Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)*.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- BORMAN, M. S. (2015). Akibat Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 1(1), 2015.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Fauzi, A. M. (2017). Hegemoni Pejudi Dalam Pilkada Di Indonesia. *DIMENSI*, 10(2).
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1).
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Eksekutif*, 2(2).

- Mustopa, F. F., & Sarip, S. (2022). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 35–49. <https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3167>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1).
- Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 18–34. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8965>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law*, 3(3).
- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id Di Indonesia. *CosmoGov*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(1).
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 4(2).
- Zen, H. R. (2015). Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-'Adalah*, XII(3).

proses pencalonan bakal calon Kepala Daerah sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun pada tingkat operasional, terutama di internal partai politik mekanisme rekrutmen belum diatur secara jelas atau kewenangan dalam keputusan akhir sangat sentralistik atau berada di tingkat pusat (DPP).

Bias tafsiran legal formal dan tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam proses rekrutmen, praktek gelap, tidak aspiratif, mal akomodatif jauh dari sektifitas dan ruang kebebasan pengajuan calon menjadi kewajaran, pada akhirnya yang terjadi bukan kontrestasi kapasitas dan kapabilitas namun terkonversi menjadi pertarungan modal atau capital yang cenderung menjadi benur oligarki baru. Proses ini pula pada akhirnya mereduksi fungsi partai yang seharusnya melahirkan pemimpin berkualitas namun sebaliknya hanya memproduksi pemimpin yang gagal dan lebih dari itu partai menjadi ruang dan fasilitas bagi pembentukan elit oligarki baru atau merawat yang sudah ada. *Wait and see*

6. Daftar Pustaka

- Amirudin (2022) Ancaman Oligarki Dalam Pilkada Serentak. Retrieved 23.1.2022. from, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/31/1504/ancaman-oligarki-dalam-pilkada-serentak.html>
- Efriza. (2012). Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta Bandung.Pp. 355-362
- Lailatul Annisa (2022). ICW sebut Politik Oligarki Sulit Dihilangkan Dam kontestasi Pemilu. Retrieved.23.1.2022. from. (<https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sebut-politik-oligarki-sulit-dihilangkan-dalam-kontestasi-pemilu>
- Puspasari Setyaningrum. (2022). Sejarah Pemilu Di Indonesia Dari Tahun 1955 Hingga 2019. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/25/203614378/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-tahun-1955-hingga-2019?page=all>.
- Riswanda Imawan. (2001). Hubungan Antar Lembaga &Pemerintah Sistem Politik & Pemerintah Indonesia.

Kumpulan Tulisan. Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. P.28

Willa Wahyuni. (2022). Pemilu 2024 dan Ciri - ciri Sistem Pemerintahan Oligarki. Retrieved, 24 .1. 2022 from, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilu-2024-dan-ciri-ciri-sistem-pemerintahan-oligarki-lt62271f70d2b2a/?page=2>

Web site

<https://www.britannica.com/topic/oligarchy>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilu-2024-dan-ciri-ciri-sistem-pemerintahan-oligarki-lt62271f70d2b2a/?page=2>

Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas. Politik hukum di Bangkalan yang menciptakan sebuah politik oligarki yang melanggangkan kekuasannya ke politik dinasti merupakan hasil dari sebuah politik hukum. Menurut Armiwulan dalam jurnal politik hukum pemerintah daerah menimbang pada huruf D UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah perlu diganti dengan penilaian bahwa UU No. 32 tahun 2004 secara substansinya tidak tepat. Namun dalam segi perspektif yuridis. dan sosiologis telah mampu menerjemahkan hakikat dari prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

5. Daftar Pustaka

- Antonio Pradjasto, "Partai Politik tak Hanya Kemampuan Memerintah," *Jurnal Jentera*, no. 16, (Juni 2007), hlm. 26
- Alexandra Cole, *Perbandingan Partai Politik: Sistem dan Organisasi, di Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid 1)*, ed. John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 249
- Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, hlm. 15
- Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, hlm. 403
- Firman Noor, *Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respon Terhadap Konsolidasi Demokrasi Indonesia* (Jakarta: RMBBooks, 2015), hlm. 3
- Hidayat, E. (2018). Kontribusi Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Progresif di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10(2).
- Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Partai Politik (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm. 15
- Indra J. Pilliang, "Kebangkitan 'Partyocracy,'" *Koran Jakarta*, 27 September 2014, hlm. 4

- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, penerjemah; Laila Hasyim, (Bina Aksara, 1984), hlm. 5
- Pramono Anung Wibowo, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator- Konstituen* (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 272-273
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003), hlm. 7-8
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Partai Politik* (Jakarta: Closs dan 7 Strategic Studies, 2003), hlm. 7-8
- Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Di Tengah Ancaman "Virus" Oligarki dan Politik Kartel," *Jurnal Ketatanegaraan*, no. 5 (November 2017), hlm. 2
- Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik* (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 4
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 115
- Salang, *Potret Partai Politik*, hlm. 8
- Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 45
- Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia: Assemen terhadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Friederich Naumann Stiftung, 2007), hlm. 5
- Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 115

BAB 3

MULTI PARTAI TALENT SCOUTING DAN POLITIK GAGASAN

Sistem Multi Partai Relasi Kelembagaan
dalam Sistem Presidensial

Abdullah Kaunar

1. Pendahuluan

Penataan sistem politik serta hubungan antar lembaga negara dilakukan sebagai wujud untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejak runtuhnya Orde Baru kita masih mencari pilihan yang tepat untuk sebuah pemerintahan yang baik. Berbagai upaya terlihat seperti halnya dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat dan massa jabatan yang telah ditentukan, seperti halnya Pemilihan anggota legislatif menempatkan kedudukan yang setara antara eksekutif dan legislatif. Kesetaraan ini karena keduanya memiliki sumber legitimasi yang sama yaitu rakyat.

Upaya untuk menghindari dominasi salah satu lembaga terhadap lembaga pemerintahan lainnya tentu sebuah hal yang positif. Dominasi presiden sebagai eksekutif di dalam sistem politik Indonesia selama ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Oleh karena itu dalam proses Amandemen, kekuasaan eksekutif berkurang tidak seperti sebelumnya dan legislatif menguat dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin proses *check and balances* antara

eksekutif dan legislatif. Namun dalam kenyataannya, hubungan antara eksekutif dan legislatif tidak terdapat keharmonisan sehingga mengakibatkan berbagai kebijakan pemerintah tidak berjalan efektif.

Adanya masalah dalam pemahaman hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif bukanlah perkara baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada masa Orde Lama, kegagalan Dewan Konstituante memutuskan untuk kembali ke UUD 1945 memicu Presiden Soekarno sebagai representasi eksekutif membubarkan Dewan Konstituante. Menguatnya kewenangan lembaga eksekutif dilanjutkan pada masa Presiden Soeharto. Lembaga legislatif tidak diposisikan sebagai mitra sejajar pemerintah sebagaimana layaknya negara demokratis. Akibatnya posisi lembaga tersebut hanya sebagai pemberi legitimasi kebijakan yang dibuat pemerintah Orde Baru. Hubungan yang mulai membaik kedua lembaga tinggi negara ini justru terjadi pada masa reformasi. Konsolidasi demokrasi yang berlangsung cepat terutama sejak mundurnya rezim Orde Baru memberikan suasana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan, yang menarik pada masa ini justru terjadi pergeseran dominasi dan determinasi kekuasaan yang selama ini ada di lembaga eksekutif ke lembaga legislatif. Penilaian anggota legislatif terhadap kegagalan Presiden Habibie menjalankan reformasi adalah awal perwujudan dominasi legislatif atas eksekutif. Sejarah juga mencatat dominasi lembaga legislatif atas eksekutif yang monumental adalah ketika Presiden Abdurrahman Wahid dimundurkan dari jabatannya tahun 2001.⁴³

Dengan diberlakukannya sistem Pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, mempertegas sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakni sistem presidensial. Selain itu juga terlihat adanya komitmen untuk menata hubungan antar lembaga dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Namun sistem presidensial yang dipadukan dengan

⁴³ Asrinaldi, A, *dalam* Media Indonesia, <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Menatap%20Hubungan%20Eksekutif-MI.htm>

5. Daftar Pustaka

- Agus Purwanto, Erwan dan Wahyudi Kumorotomo, "Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi Parleментар", Gava Media, Yogyakarta, 2005
- Ambardi Dodi dan Sigit Pamungkas, "Bahan Bacaan: Partai, Pemilu dan Legislasi, Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2010
- Budiardjo Miriam, "Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)", Gramedia, Jakarta, 2008
- Lijphart, Arend, "Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries", New Haven and London, Yale University, 1999
- Linz, Juan, "Menjauhi demokrasi kaum penjahat: belajar dari kekeliruan negara-negara lain (Terjemahan dari Defening and Crafting Democratic)", Mizan, Bandung, 2001
- Tim Penulis AIPI, "Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Sumber lain:

<http://els.bappenas.go.id/upload/other/Menatap%20Hubungan%20eEksekutif-ML.htm> (Asrinaldi, A, Media Indonesia, 28 Januari 2023)

sehingga mampu menghidupi klub dan akademi sepak bola sebaliknya dalam partai politik berusaha menemukan calon pemimpin yang berkualitas kemudian di terbitkan di dalam partai sehingga partai memiliki nilai jual yang tinggi karena dengan ide ide atau gagasan yang brilliant kemudian menjadikan sebuah produk yang memiliki nilai jual yang tinggi yang kemudian di beli oleh masyarakat.

7. Daftar Pustaka

Buku

Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Asykuri Ibn Chamim, Bambang Cipto, Haedar Nashir, Istianah ZA, Khoiruddin Bashori, Lilis Setiartiti, Muhammad Azhar, Said Tuhuleley. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan. Menuju Kehidupan yang demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta. Majelis pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Djuyandi, Yusa, (2017). *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Pers.

Lobolo, Muhadun, Ilhom, Leguh. (2015). *Partai politik dan Sistem pemilihan umum di Indonesia. Teori, Konsep dan Isu Strategis*. PT. Rajagrafindo Persada.

Indra Pahlevi, 2015, Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.

Media Online

Di akses pada Minggu 15 Januari 2023:
<https://www.kompasiana.com/syawaludinfarizi3852/60dc5bf215251038967ca412/pengelolaan-keuangan-partai-politik-di-indonesia>

Di akses pada Sabtu 7 Januari 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/20114151/3-hal-ini-dinilai-jadi-masalah-utama-partai-politik>

Di akses pada hari Selasa, 17 Januari 2023:
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf>

Menurut Aditya (2019) dalam politik dibutuhkan kekuasaan, itu benar. Namun, ia (mestinya) hanya sekadar alat untuk mencapai kebaikan public. Sejatinya, politik merupakan tentan gagasan. Gagasan tentang apa yang dinilai baik dan adil bagi publik. Oleh karena itu, politik yang tidak bermuatan gagasan sesungguhnya telah melenceng jauh dari hakikat politik. Dengan politik gagasan, kita tengah melakukan restorasi politik sebagai sarana utama untuk mencapai kebaikan bersama. Dengan kata lain, politik gagasan membawa kembali demokrasi untuk berkhidmat penuh kepada republik.

5. Daftar Pustaka

- Andriadi, Fayakhun, 2017, *Partisipasi Politik Virtual, Demokrasi Netizen di Indonesia*, RMBooks, Jakarta.
- Habermas, Jurgen. 1989. Ruang Publik :Sebuah Kajian TentangKategori Masyarakat Borjuis. Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), 2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Labolo, Muhadam, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Pratikno,2004 *Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004* dalam M. Faried Cahyono dan Lambang Trijono, (Eds). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*. CSPS Books, Yogyakarta.
- Reynolds, Andrew,2001, *Merancang Sistem Pemilihan Umum* dalam Juan J. Linz, dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Mizan,Bandung
- Tricahyono ,Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, InTrans Publishing, Malang
- <https://m.mediaindonesia.com/opini/271929/restorasi-politik-gagasan,16> november2019
- <https://asumsi.co/post/56400/politik-milenial-politik-berbasis-ide-dan-gagasan/>
- <https://mojok.co/kilas/kotak-suara/mengenal-politik-gagasan->

perwujudan-pemilu-ideal-di- 2024/
[https://rumahpemilu.org/djayadi-hanan-politik-gagasan-penting-siapkah-partai-politik- memulai/](https://rumahpemilu.org/djayadi-hanan-politik-gagasan-penting-siapkah-partai-politik-memulai/)
<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/04/pandemial-dan-politik-gagasan>
[https://repjogja.republika.co.id/berita/roluq9291/pengamat-politik-gagasan-akan-tingkatkan- jumlah-pemilih-rasional-pada-pemilu-2024](https://repjogja.republika.co.id/berita/roluq9291/pengamat-politik-gagasan-akan-tingkatkan-jumlah-pemilih-rasional-pada-pemilu-2024)
<https://muhammadiyah.or.id/yudi-latief-muhammadiyah-adalah-bentuk-good-politikidentitas/> Malutpost, Edisi 31 Januari 2023

mempertahankan massa pendukungnya, walaupun badai politik menimpa partai politik tersebut. Pada posisi ini partai politik hendaknya menata terus menerus kelembagaannya dan tidak berhenti setelah pemilu usai.

7. Datar Pustaka

Abdul Mukthie Fadjar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang

Budiardjo, Mirriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

.....2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Efriza, 2012, *Political Explore*, Bandung: Alfabeta,

Richards. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusamedia

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sigit Pamungkas, 2011, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute For Democracy and Welfarism, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

BAB 4

PEMILU CALON TUNGGAL KOTAK KOSONG DAN GOLPUT

**Anomali Demokrasi Lokal
(Fenomena Calon Tunggal VS Kotak Kosong dalam Pilkada)**

Sahrul Pora

1. Pendahuluan

Demokrasi dalam makna yang sangat klasik ialah suatu pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maksud dari pengertian tersebut adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena rakyat ialah pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUD 1945 (Pora, Qodir dan Purwaningsih, 2021:18). Dijelaskan pula oleh Huntington (1989:15) bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu pemilu sangat sejalan dengan demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (Tanjung & Saraswati, 2020:276).

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk penerapan dari kedaulatan rakyat. Untuk itu pemilihan kepala daerah harus didasarkan pada prinsip jujur, bebas, rahasia dan adil. Sebagai wujud penerapan kedaulatan rakyat, pemilihan kepala daerah tidak hanya sekedar dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan dalam mengubah mekanisme

lama dimana pemilihan dipilih melalui DPRD, akan tetapi didasarkan pula pada landasan filosofis bahwa pilkada harus mampu menciptakan demokratisasi ditingkat daerah. Penerapan model tersebut tentu akan berpengaruh pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap momentum politik elektoral karena kehadiran mereka dalam menentukan pemimpinnya di tingkat daerah telah diakomodir. Perubahan format lama ke yang baru mulai terjadi paska reformasi dan sampai saat ini telah diakui oleh berbagai kalangan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan sistem demokrasi yang lebih baik. Dasar argmentasi yang disampaikan itu dapat dilihat dari dilaksanakannya pergantian kepemimpinan nasional baik pesiden dan wakil pesiden dan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat dalam kerangka demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasar dari paham tersebut. Konsep kedaulatan menurut Jean Bodin memiliki 3 (tiga) unsur yaitu: kekuasaan bersifat *supreme* artinya tidak ada kedaulatan/kekuasaan yang lebih tinggi, dan bersifat asli yang dapat dimaknai tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; mutlak dan sempurna yaitu tidak ada kekuasaan yang dapat membatasinya; utuh, bulat dan abadi, yaitu tidak terbagi-bagi (Ishak, 2020:138). Mengutip pula pendapat dari Imawan & Ramadhan (2021:141) Bahwa terlepas dari perkembangan pemilu dari aspek prosedural maupun substantif, warga negara selalu akan menjadi titik utama dari sistem demokrasi.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung pada gilirannya akan semakin meningkatkan kualitas keterwakilan dari seorang pemimpin yang terpilih, sebab masyarakat sendiri yang kemudian menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin mereka. Dalam konteks itu maka terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai pijakan dalam melihat kualitas demokrasi yang sesungguhnya sebagai dampak dari pelaksanaan pilkada secara langsung. Pertama, pemilihan

kader sendiri dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Penulis menyadari pula bahwa kerangka hukum dalam pencalonan kepala daerah di Indonesia perlu ditinjau kembali. Tinjauan tersebut terkait dengan produk hukum batas minimal dalam pencalonan kepala daerah, baik besaran kursi yang dimiliki oleh partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah, dan syarat-syarat pencalonan bagi calon perseorangan (independen).

Mengutip penegasan dari Tanjung & Saraswati, (2020:285) bahwa kerangka hukum harus bisa memberikan jaminan dalam batasan maksimal dukungan kursi pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi lebih sedikit dari yang saat ini digunakan. Hal tersebut agar tidak memberikan peluang yang terlalu bebas terhadap monopoli individu ataupun kelompok pemodal atas persyaratan dukungan kepada calon kepala daerah. Ikhtiar ini dilakukan agar bisa memberikan kesempatan kepada figur lain yang tidak memiliki dukungan kursi yang banyak dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD sehingga bisa muncul lebih dari satu pasangan calon. Kerangka hukum lain ialah harus bisa memberikan kemudahan dan mengurangi jumlah persebaran pemilih sebagai persyaratan bagi pasangan calon perseorangan (independen). Hal itu dilakukan agar muncul banyak pasangan calon kepala daerah yang akan saling berkompetisi dalam memenangkan suara pemilih sehingga terdapat beragam pilihan bagi masyarakat itu sendiri.

5. Daftar Pustaka

- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Chumaeson, W. (2021). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Tahun 2020: Studi Kasus Pemiliha Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Sragen. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 02(06).

- Dhesinta, W. S. (2016). Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015). *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta*, 4(1).
- Erviantono, T. (2017). Budaya Politik, Uang, Dan Pilkada. *Jurnal Transformativ*, 3(2).
- Farida, I. (2019). Mahar Politik Dalam Pandangan Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2137>
- Fauzi, H. A. (2014). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. 15.
- Ishak, N. (2020). Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1144>
- Mahpudin, M. (2021). Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(02), 149-166. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2643>
- Mamonto, K. S. A., & Setiyono, J. (2021). DEMOKRATISASI CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Rechtidee*, 16(2), 202-222. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.12065>
- Marefi, W. H. (2022). Analisis Calon Tunggal Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Balikpapan. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Pamenang Imawan, R., & Ramadhan, D. (2021). Melampaui Politik Uang Studi Kasus Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Pilwako Medan Tahun 2020. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 137-153. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.261>
- Panjaitan, M., & Hulu, S. B. (2021). Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), 116-130. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411>
- Pora, S., Qodir, Z., & Purwaningsih, T. (2021). Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan

- Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 18-34.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8965>
- Prakoso, D. W. U. (2018). Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus : Pilkada Kabupaten Pati 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2).
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047.
<https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Riyanto, A. (2021). Fenomena Pasangan Calon Tunggal Pada Pilkada Serentak Di Jawa Tengah. 18(2).
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2).
<https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Suparman, A. N., & Rahman, G. Y. (2017). PARTAI POLITIK DAN KADERISASI. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(4).
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2020). Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 269.
<https://doi.org/10.29123/Jy.V12i3.319>
- Yunus, N. R. (2018a). Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik. 'ADALAH, 1(4).
<https://doi.org/10.15408/adalah.v1i4.8216>
- Yunus, N. R. (2018b). Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada. 'ADALAH, 2(7). <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i7.8526>

Web-site

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/16194541/persolan-calon-tunggal-di-pilkada-menurut-bawaslu-mahar-hingga-politik-uang>

3. Daftar Pustaka

- Ali Novel, 1999. Peradaban Komunikasi Politik, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Fadillah Putra, 2003. Partai politik dan kebijakan publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. (2006). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Irtanto, 2008. Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- IBRAHIM, Abdulhalil Hi, et al. Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020, 4.2: 768-776.
- Kacung Marijan, 2006, Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya
- LA SUHU, Aswir F. Badjodah Bakri. Politik Identitas Di Pilkada Maluku Utara 2013. *Ejournal KAWASA*, 2019, 9.2: 33-53.
- Miriam Budiardjo, 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- PARYANTO, Paryanto, et al. Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2022, 4.2: 150-164.
- Saifullah Eep Fatah, "4 Faktor Mengapa Masyarakat Golput," *Koran sindo*, No. 237 (Edisi Rabu, 7 Januari 2009)
- WANCE, Marno; LA SUHU, Bakri. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2019, 4.2: 91-115.

TENTANG PENULIS



Dr. Aji Deni, S.Pd., M.Si.

Lahir di Desa Tolonuo Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, 15 Desember 1975. Penulis adalah Dosen Pascasarjana S2 Ilmu Administrasi UMMU dan Program Studi S1 Ilmu Politik UMMU. Semasa mahasiswa sempat menjadi Ketua BEM Fakultas FKIP Unkhair (1998-1999) dan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Maluku Utara (1999-2000). Penulis melanjutkan Studi Pendidikan Bahasa Inggris Strata 1 FKIP dan selesai tahun 2003 di Universitas Khairun Ternate. Tahun 2005 melanjutkan Studi di Sekolah Pascasarjana Magister S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, diselesaikan tahun 2007. Penulis juga melanjutkan Studi S3 Doktoral Politik Islam-Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan dinyatakan selesai pada bulan September, 2020. Pernah menulis beberapa Buku Referensi dan Monograf baik sebagai penulis tunggal, maupun Bersama dengan penulis lainnya dalam kumpulan tulisan. Saat ini Sebagai Pengurus AIPI Cabang Maluku Utara (2020-2023), dan Dekan FISIP UMMU tahun 2022-2026.2



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si

Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Anak Ke-9 dari 11 bersaudara, Ayahnya Hi. Ibrahim Tjan Bin Hi. Abdullah Tjan Hoat Seng, Ibunya Bernama Tjili Muhammad Said Tjan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan sebagai Dosen Pascasarjana UMMU, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Ketua Tim Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2018), Direktur Program Pascasarjana UMMU (2018-2022), Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Masa Jabatan 2022-2026., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak, Yaitu: Gibran Chalil Tjan (2004), Ghadiza Chalil Tjan (2006), Ghifar Chalil Tjan (2010) dan Gherhana Chalil Tjan (2015)

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman, diantaranya: Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan (2005), Sebagai Sekretaris TIM Pendiri Pascasarjana (S2) UMMU Tahun 2007, Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara tahun 2010, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, Ketua FKDM Kota Ternate Tahun 2015, Tim Kajian Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate (2017), Ketua TIM Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli dan Nara sumber Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2019, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate Tahun 2019, TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate, Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Persiapan Implementasi Pendidikan

Anti Korupsi Oleh KPK RI dan LLDIKTI Wil XII Tahun 2019, Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan Pemerintahan., Mengikuti Leadership Training Nasional Pimpinan PTM Angkatan Ke-3 Yogyakarta Tahun 2019, Ketua TIM Kajian Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, Panelis Debat Kandidat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perguruan Tinggi dan Rencana Operasional (Renop) Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2021-2025.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : *Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018)*, *The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018)*, *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018)*, *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018)*, *The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018)*, *Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018)*, *Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018)*, *The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018)*, *Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019)*, *Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021)*.

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : *Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace*

Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara (2022), Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) (2022)

Semua Article yang telah di Publis Pada Jurnal Internasional terindex Scopus , Internasional dan Jurnal nasional tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, Penerbit : UMMU Press dan Gramasurya Yogyakarta 2019, Implementasi Kebijakan Presisi Kapolri Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022 Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Koordinasi Antar Stake Holder Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Maluku Utara, , Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022. Sebagai Kontributor Penulis pada Buku Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Melalui Program Detasering, Catatan Pengalaman Detaser di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Insan Cendekia Mandiri 2021.

Sebagai Penyunting Buku: Ternate Bandar Jalur Sutera, Lintas (2001), Negara Hukum dan Good Governance, Ummu Press 2010, Anomali Pendidikan, Kebijakan, Problem & Realita, Ummu Press 2011, Empat Kuliah Hukum Tata Negara (Staadslehre In Ruimere Zin), Ummu Press 2014.



Dr. H. Iksan R.A. Arsad, M.Si,

Dilahirkan di Soasio Galela Halmahera Utara pada 04 Nopember 1970. Pendidikan SD, MTs Muhammadiyah dan SMA di Galela, Halmahera Utara. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan pada APDN Ambon pada 1991, S1 Ilmu Politik pada Institut Ilmu Pemerintahan IIP Jakarta tahun 1996, S2 Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan di Univ, Padjadjaran tahun 2000 dan selama 3,5 tahun

menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Politik pada FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Bekerja di pemerintahan daerah mulai dari staf Kantor Kecamatan Tidore, Kab. Halmahera Tengah 1992-1993, Staf pada Biro Kepegawaian dan Biro Umum SETDA Provinsi Maluku di Ambon 1994-2002, Biro Infokom SETDA Provinsi Maluku Utara 2002-2009, Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Maluku 2009-2017, Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Maluku 2017- sekarang (menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas sejak 2019). Sejak 2003 menjadi staf pengajar di FISIP UMMU Ternate dan sejak 2020 menjadi staf pengajar pada Pasca Sarjana Ilmu Administrasi UMMU Ternate. Aktif melakukan penelitian di bidang ilmu politik dan pemerintahan serta menjadi presenter pada National and International Conference Political Science.



Rasid Pora, S.IP., M.IP

Lahir di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Mei 1982, anak ke-5 dari 5 orang bersaudara, Ayahnya Tahir Pora, dan Ibunya bernama Hj. Hasna Umasangadji. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007) dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (2014). Berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) sejak 2010/ sekarang. Jabatan yang pernah diemban sebagai Ketua Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023), Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip-UMMU (2018-2022), sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip-UMMU (2022-2026). Menikah dengan Eka Nurwandina, ST dan dikaruniai

tiga orang anak, yaitu: Barra Rizqullah Pora, Muhammad Al-Ghifari Pora dan Dira Rahmah Shanum Pora.

Beberapa artikel yang di public pada jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain; (1). *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), (2). *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018), (3). *Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera* (2020) dan (4). *Bureaucracy Conflicts in Border Areas: Study on Conflict Between Civilian State Apparatus and Regent in Morotai Island Regency* (2021). Untuk jurnal nasional antara lain: (1). *Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial: Ratna Serumpaet Hoax and Discourse War on Social Media* (2022), (2). *Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan* (2019).

Penulis juga telah menerbitkan beberapa buku bersama kolega diantaranya adalah: (1). *KONFLIK dan Pergerakan Sosial , Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan* (Graha Ilmu Yogyakarta, 2015); (2). *Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kibijakan dan Konsensus* (Buku Litera 2021); (3). *SPIRIT KAHML, Tafsir Pemikiran Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan* (Insan Cita Publishing 2021); (4). *POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik* (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (5). *KONFLIK SENKETA TANAH BANDARA Di WILAYAH TARAKANI* (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (6). *PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah* (Cv. Eureka Media Aksara 2023); (7) *“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan* (Cv. Eureka Media Aksara 2023)“.

Ali Lating M.A.



Lahir di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. 13 Juni 1972. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar di SD Negeri II Hila - Kaitetu pada tahun 1986, SLTP. Hila-Kaitetu Tahun 1989, dan SMU Hila-Kaitetu Tahun 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1989. Pada Tahun 2005 diterima sebagai Dosen Kopertis kini LLDikti Wilayah XII dan ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Pada Tahun 2009 melanjutkan program magister di Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan selesai pada tahun 2011. Bersinergi dengan sejumlah akademisi, stakeholder dan lembaga Publik maupun LSM di Maluku Utara untuk sejumlah kegiatan antara lain : Tim Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Unit Pengaduan RSUD Hasan Boesiri dan RSUD Jailolo Halmahera Barat 2017. Tim Seleksi PANWAS Kabupaten /Kota Provinsi Maluku Utara 2017. Asesor BAN S/M. Provinsi Maluku 2018- 2020. Kepala Bidang Pemuda Dan Pendidikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Maluku Utara Periode 2020-2024 Tim penyusunan materi debat kandidat tahap I Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaheras Selatan Tahun 2020. Pengurus Wilayah Maluku Utara Dosen Muslim Indonesia periode 2018-2023. Direktur Development Legislative And Government Responsiviness Institute (*DE'Leger Inst*) Maluku Utara.

Sejak 2008 hingga 2022 terlibat dalam sejumlah riset antara lain: Baseline Survey Maluku Utara, UNDP Indonesia 2008. Peneliti local Dalam Studi Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Biaya dan Logistik Pemilu / Pilkada Di KPU/KPUD (Pemilu 2004/ PILKADA 2007) GOCEFA- SEKNAS FITRA Maluku -Utara 2008. Survey Pemetaan Potensi Dan Sumber Konflik Di Propinsi Maluku Utara Kerja sama KESBANGPOLDANLINMAS

Propinsi Maluku Utara 2013. Riset Stratifikasi Politik Masyarakat Adat Ternate (Studi Relasi Kuasa, Struktur Dan Fungsi Di Kesultanan Ternate) DIKTI 2013. Peneliti Tamu “ Teacher Absenteeism -ACDP11 Di Wilayah Propinsi Maluku Utara Dan Maluku Lembaga Penelitian SMERU 2013. Poverty Assessment North Mollucas (CEFORDES UMMU) 2014. Survey Logistik Maluku Utara Kerja Sama BALITBANGDA Propinsi Maluku Utara dan LP2M UMMU 2015. Riset Potensi Terorisme di Propinsi Maluku Utara Kerja sama BNPT Tahun 2015. Riset Dinamika Politik Pemilu Legislatif Kerja sama dengan Jurusan Politik Pemerintahan UGM dan Australian National University (ANU). Tahun 2014. Riset Nasional Partai Politik Di Indonesia Kerja sama dengan Center Strategic And International Studies (CSIS) Tahun 2015. Riset Konflik Pemilihan Kepala Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan DIKTI 2015. Riset Politik Lokal (Studi Rekrutmen Elit Strategis, Pengelolaan Sumber Daya, Dan Pengelolaan Konflik. Hila, Leihitu, Maluku Tengah, 2018) Riset Penguatan Kebhinekaan Dan Literasi Digital Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Melalui BNPT/FKPT Maluku Utara Tahun 2020. Riset Kemampuan Pemerintah Dalam Kebijakan Strategis. Covid -19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability (Kapasitas Pemerintah) Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Di Provinsi Maluku Utara. 2020. Riset Tawaf dan Sigafo Gam Cara Masyarakat Adat Kesultanan Ternate Berdamai Dengan Covid -19. 2021 Riset Politik Lokal (Pengelolaan Sumber Daya Alam) Kampung Mello, Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, 2021. Riset Indeks Potensi Radikalisme Dan Terorisme BNPT/FKPT Di Halmahera Utara (2022)

Buku: Indonesia Di Perbatasan Dan Kepulauan. Terbit Tahun (2014), Politik Desentralisasi Dan Kajian Otonomi Daerah (2020), Dinamika Dan Isu Politik Lokal Maluku Utara (2021). Covid-19 Dan Governability (2021), Kearifan Budaya Lokal Indonesia Timur (2021).

Buku Karya Bersama: Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) (2021). Potret Buram

Pemerintahan. Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi Dan Konflik (2022). Pemimpin Ideal Catatan Untuk Kepala Daerah (2023). Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Di Indonesia (2023).

Editor: Jelajah Pulau Maitara (2021). Merawat Perdamaian Di Bumi Hibua Lamo (2022). Pengantar Protozoologi Kesehatan (2022). Prospek Pengembangan Sayuran Hidroponik (2022). Instrumentalisasi Politik Identitas (2023). Rekrutmen Elite Strategis Partai Politik (2023)



Raoda M. Djae S.Ag, M.Si.

Lahir 20 Mei 1970 di Akelamo Kao Kec.Jailolo Timur, Menyelesaikan Pendidikan SD di Akelamo Kao Jailolo Timur, SMP dan SMEA di Tobelo Halmahera Utara selesai Tahun 1990. Kuliah S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ternate Jurusan Pendidikan Agama Islam, selesai tahun 1995. Masuk S2 Magister Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate selesai tahun 2011. Saat ini Menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dan dipercayakan untuk menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMMU.

Sebagai Dosen, tentu harus mempunyai hasil karya yang dapat dijadikan pedoman dalam berkarya. Penulis beberapa kali menulis dan menghasilkan karya pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jurnal nasional antara lain; Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara (Terbitan Tahun 2019), Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018 (Terbitan Tahun 2019), Faktor Pemicu Utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Anggaran 2018 (Terbitan Tahun 2019), KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate) (Terbitan Tahun 2020), EFEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI

MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (Terbitan Tahun 2021), PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (Terbitan Tahun 2021), dan PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DESA (Studi Di Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan) (Terbitan Tahun 2022). Sedangkan Jurnal Internasional "Implementation of standard operational procedures (SOP) information dissemination of BMKG tsunami early warning at the geophysical statium of ternate (Terbitan Tahun 2021)



Abdullah Kaunar, S.IP, M.A,

Lahir di Ternate 01 Juli 1982. Menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2000-2005 dan melanjutkan studi Magister (S2) pada Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009-2011. Penulis sejak tahun 2005 hingga sekarang merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan pernah menjabat Sekretaris dan Ketua Program Studi. Penulis juga terlibat aktif pada organisasi-organisasi yg bidang kajiannya yakni politik & pemerintahan. Begitu pula dengan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan dengan tema-tema politik pemerintahan. Salah satu kosentrasi kajiannya adalah Partai Politik dan Pemilu.



M. Rusdy Namsa, S.IP, M.Si

Lahir di Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan melanjutkan program magister (S-2) di Jurusan Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, selesai pada tahun 2021. Pada saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di samping itu penulis juga sebagai Founder Soccer School Sangaji Malamo. Kota Ternate. Terlibat dalam sejumlah riset diantaranya riset Indeks Potensi Radikalisme dan Terorisme di Maluku Utara Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme (BNPT) Dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku Utara (2022).

Artikel yang pernah ditulis di antaranya; Pengaruh Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2014). (2) Indonesia Sebagai *Epicentrum* Dunia. Peluang dan Tantangan (2017). (3) *Will Turkey Become European Union Member?* (2017). (4) Buku Partai Politik Pemilu Dan Oligarki Indonesia (2023).



Syarifuddin Usman

Lahir di Tobelo 21 November, sejak 2008 diangkat menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara program studi Ilmu Pemerintahan FISIP. Sebelum menjadi dosen, pernah menjadi wartawan Ternate Post (2000-2006), kemudian menjadi orang kontrakan di LSM GOCEFA selama 4 (empat) tahun (2006-2010) dan dipercaya menjadi Manager Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (LEAD) kerjasama UNDP dan BAPPENAS. Banyak melakukan survey dan riset diantaranya, riset penelitian dosen pemula (PDP) tahun 2016

Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Miliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan dan Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara), Riset Fort Oranje : Dari Masa Ke Masa, Identitas dan Integrasi Permukiman Ruang Kota Ternate (2019) Pengelolaan Sampah di Kota Ternate ; Studi pada Dinas KLH Kota Ternate (2021), riset Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah : Studi Kasus Penjabat Kabupaten Pulau Morotai (2022), Riset Pemanfaatan Ruang Masyarakat lingkaran Tambang (2022) Saat mahasiswa, menjadi aktivis HMI Cabang Ambon (1994-1995) dan Badko HMI Malirja (1999-2000). Saat ini menjadi pengurus sejumlah organisasi, Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara (2021-2026), Pengurus Majelis Pengurus Wilayah ICMI ORWIL Maluku Utara (2021-2026), Menjadi aktivis lingkungan di Komunitas Eco Enzyme Maluku Utara. Menulis opini di media lokal dan online. Penulis bisa dihubungi melalui email syarifusman149@gmail.com



Rahmat Suaib, S.IP., M.IP.

Lahir di Dokulamo, 12 Februari 1981, Penulis menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Dokulamo Galela, sekarang MIN-2 Halmahera Utara, dan SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Dakulamo Galela, sekarang MTSN-1 Halmahera Utara. Kemudian tingkat SMA penulis menyelesaikan studi pada SMUN-1 Galela Soasio Tahun 1999, sekarang SMAN-2 Halmahera Utara. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2005), dan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014).

Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, saat ini menjabat sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Beberapa karya yang telah terbit di antaranya: Kinerja Pemerintah Daerah Pasca Pemekaran, Penerbit Eureka Media Aksara, 2022. Potret Buram Pemerintahan dan Kepemimpinan Ideal. Penerbit Eureka Media Aksara (2022).



Sahrul Pora, S.IP, M.IP

Lahir di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada tahun 2017 dan melanjutkan program magister (S-2) di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selesai pada tahun 2021. Pada saat ini penulis dipercayakan menjadi asisten dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Beberapa artikel dari penulis yang sudah terbit di jurnal nasional antara lain; (1) Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 (2021), (2) Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua (2021), (3) Transformasi Aktivitas K-Popers Di Media Sosial: Analisis Drone Emprit Dalam Framing Isu UU Cipta Kerja (2021), (4) Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial (2022), dan (5) Pengaruh Kualitas Pelayanan E-KTP Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (2022). Sedangkan buku (Kumpulan tulisan) yang pernah ditulis oleh penulis yakni “POTRET BURAM PEMERINTAHAN: Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” terbit tahun 2022.



Bakri La Suhu, S.IP, M.A,

Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata

Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di publikasikan di jurnal Internasional terindeks Scopus yakni; *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara* (2019), *Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan*, (2019), *REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015)* (2019), *SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN*

HALMAHERA BARAT (*Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village*) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (*Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano*) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (*Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu*) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 DI Pulau Ternate (*Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara*) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ, Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan